



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

FORUM PEMBANGUNAN DAERAH Kerjasama The SMERU Research Institute dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

“Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan serta
Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi NTT”

Rabu, 27 September 2023

Latar Belakang

The SMERU Research Institute (SMERU) adalah lembaga independen yang bergerak di bidang penelitian dan studi kebijakan publik (<http://smeru.or.id>). Misi utama SMERU adalah mendukung peningkatan kualitas kebijakan yang promasyarakat miskin berbasis hasil penelitian. Dalam rangka mendukung pengembangan diskursus kebijakan penurunan kemiskinan dan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), SMERU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT menyelenggarakan **Forum Pembangunan Daerah 2023** yang mengusung tema **“Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan serta Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi NTT”**.

Provinsi NTT terdiri atas beberapa pulau besar, yaitu Sumba, Timor, Flores, Alor, Lembata, Rote, dan Sabu, serta banyak pulau-pulau kecil lainnya. Dengan kondisi geografis yang menantang dan iklim yang kering, Provinsi NTT perlu terus melakukan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Dalam aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi NTT yang bertumpu pada sektor pertanian juga terguncang oleh Pandemi COVID-19. Saat puncak pandemi COVID-19 pada 2020, pertumbuhan ekonomi provinsi ini menyentuh angka negatif (-0,84%), namun demikian sektor pertanian saat itu tetap tumbuh positif sebesar 0,95%. Meski pada 2022 telah tumbuh 3,05% pada 2022, angka ini belum menyamai angka pertumbuhan 5% seperti sebelum masa pandemi. Masih diperlukan strategi dan upaya yang lebih efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada masa sebelum pandemi.

Dari aspek sosial, NTT juga menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan dan ketimpangan. Dalam sepuluh tahun terakhir, tingkat kemiskinan provinsi ini terus berada di atas rata-rata nasional. Disparitas kemiskinan antarwilayah di Provinsi NTT juga masih tinggi, baik dari sisi kewilayahan (desa dan kota) maupun antarkabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa solusi untuk mengatasi kemiskinan bagi tiap-tiap wilayah bisa jadi berbeda-beda.

Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor. Dalam publikasinya, BPS menyebutkan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di NTT pada umumnya mengalami tantangan dalam hal rendahnya capaian pendidikan, akses mendapatkan air layak, dan kemampuan memperoleh fasilitas kesehatan¹. Hal ini kemudian berdampak pada isu lain seperti, status gizi balita - *stunted* dan *underweight* yang berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 di NTT yang prevalensinya mencapai 36,5 persen; jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional (21,6 persen). Namun demikian, menurut data e-PPGM, kondisi stunting NTT hasil pengukuran Agustus 2023 sebesar 15.2%.

Selain itu, data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas² juga menunjukkan bahwa selain pada pilar pertama (pertumbuhan dan perkembangan ekonomi), NTT juga masih perlu menaruh perhatiannya pada isu pilar kedua, yaitu tentang pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Secara umum, berdasarkan indeks ini, Provinsi NTT masih berada pada urutan ketiga terbawah setelah Provinsi Papua Barat dan Papua pada 2021.

Forum Pembangunan Daerah 2023

Forum Pembangunan Daerah (FPD) merupakan forum tahunan yang diselenggarakan SMERU bekerja sama dengan pemerintah provinsi di berbagai daerah. Forum ini telah dilaksanakan sejak 2016 untuk memfasilitasi dialog kebijakan dan penyebaran hasil-hasil penelitian, baik yang dilakukan SMERU maupun yang lembaga-lembaga lain. Dialog kebijakan di tingkat daerah ini dilatarbelakangi pentingnya peranan daerah, khususnya kerja sama antarberbagai pemangku kepentingan—baik pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak terkait lainnya - dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Pada 2023, FPD akan diselenggarakan di NTT dengan usulan tema "**Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan serta Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi NTT**". Sejalan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Pembangunan di NTT, diskusi kebijakan FPD 2023 ini akan berfokus pada isu:

1. Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Penghidupan yang Berkelanjutan
2. Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
3. Pengembangan Pariwisata untuk Mendukung Pengembangan Penghidupan dan Pelestarian Lingkungan

FPD 2023 diharapkan dapat menjadi wahana dialog antarpemangku kepentingan di NTT untuk menyusun opsi kebijakan dan strategi efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan, sekaligus memaksimalkan potensi daerah dalam memastikan pembangunan

¹ BPS (2023), Ringkasan data dan informasi kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022

² <https://inklusif.bappenas.go.id/indeks>

ekonomi inklusif yang berkelanjutan serta penurunan kemiskinan. FPD 2023 diselenggarakan oleh SMERU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT pada 27 September 2023.

Tujuan Kegiatan

Secara umum, FPD bertujuan untuk mendukung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah kabupaten/kota di NTT, serta pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan di wilayah tersebut. Secara khusus kegiatan ini memiliki tujuan berikut:

- a. Mempererat jejaring kerja sama dan mendorong diskursus kebijakan antara SMERU dengan Pemerintah Provinsi NTT dan berbagai pemangku kepentingan lainnya;
- b. Memfasilitasi dialog kebijakan, pertukaran informasi praktik baik dan pengalaman di antara pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan masyarakat;
- c. Memaparkan dan mendiskusikan temuan dan rekomendasi dari hasil penelitian SMERU di NTT, terutama yang berkaitan dengan pembangunan inklusif berkelanjutan, kemiskinan dan ketimpangan, dan nutrisi;
- d. Mengidentifikasi upaya kerja sama antarpemangku kepentingan berdasarkan tantangan yang dihadapi NTT. Hal ini dapat menjadi bahan masukan untuk kebijakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, khususnya terkait penurunan kemiskinan ekstrem dan *stunting* di NTT.

Peserta

Peserta FPD 2023 adalah pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, Lembaga donor, dan masyarakat umum yang berkepentingan dan berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.

Kegiatan akan dilaksanakan secara hibrida (daring dan luring). Peserta yang berdomisili di luar NTT akan mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom, sedangkan peserta yang berdomisili di sekitar NTT akan mengikuti kegiatan secara luring.

Keluaran

Secara umum keluaran (*output*) dari kegiatan ini berupa identifikasi tantangan dan rekomendasi upaya kolaboratif untuk menyelesaikan tantangan yang terkait dengan kebijakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di NTT.

Alur Kegiatan

FPD 2023 akan dilaksanakan selama satu hari dan terdiri atas tiga sesi, yaitu:

1. Diskusi Pembuka

FPD akan dibuka dengan sambutan dari pihak SMERU dan Provinsi NTT, kemudian dilanjutkan dengan diskusi pembuka yang membahas potensi dan tantangan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di NTT. Sesi ini akan diisi dengan tiga paparan, yaitu dari Pemerintah Provinsi NTT, Akademisi di NTT, dan SMERU yang dilanjutkan dengan diskusi dengan para peserta diskusi. Peserta pada sesi pleno ini adalah masyarakat umum dan tamu undangan.

2. Diskusi Paralel

Sesi selanjutnya adalah diskusi paralel yang dibagi ke dalam tiga kelompok guna membahas tiga topik FPD. Setiap kelompok memiliki satu pemantik diskusi yang berperan sebagai fasilitator untuk menggali masalah dan alternatif solusi di kelompoknya (baik dari perwakilan SMERU, pemangku kepentingan, lembaga penelitian, organisasi nonpemerintah, dan lain-lain). Sesi ini diikuti peserta luring dan daring dengan format hibrida.

3. Diskusi Terpusat

Hasil diskusi paralel ketiga kelompok dikumpulkan dan dibahas kembali pada sesi ini. Sesi diskusi terpusat ini sendiri bertujuan membahas dan mempertajam rekomendasi kebijakan daerah dan upaya kolaboratif dalam merespons tantangan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di NTT, yang telah dirumuskan dalam diskusi paralel.

Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu : 27 September 2023 pukul 08.30–15.30 WITA

Tempat : Aula Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur

Jl. El Tari No. 52, Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT

Agenda Kegiatan

Waktu (WITA)	Durasi	Agenda acara
08.30 – 09.00	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Registasi Peserta & Pengambilan Konsumsi • Penampilan Grup Vokal <p><i>Ruangan Zoom akan dibuka pukul 08.50 WITA (GMT+8)</i></p>
Sesi Pembukaan		
09.00 - 09.05	5 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Sapaan Pembuka • Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
09.05 - 09.10	5 Menit	<p>Laporan Panitia Maxianses H. Manafe, S.Sos, M.Si. (Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT)</p>
09.10 - 09.20	10 Menit	<p>Arahan Pembukaan oleh Penjabat Gubernur Ayodhia G.L. Kalake, S.H., MDC. (Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur)</p>
Sesi Panel		
09.20 – 10.25	5 menit	<p>Pembukaan Sesi Panel Moderator: Erika Widyaningsih (Direktur Rumah Kebangsaan)</p>
	10 menit	<p>Presentasi oleh Direktur The SMERU Research Institute Ir. Widjajanti Isdijoso, M.Ec. St (Direktur The SMERU Research Institute)</p>
	10 menit	<p>Presentasi oleh Akademisi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Dr. Frits Fanggidae (Akademisi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW))</p>
	10 menit	<p>Presentasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kosmas Damianus Lana, SH, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur)</p>
	30 menit	<p>Sesi Tanya Jawab</p>
10.25 – 10.30	5 Menit	<p>Peserta Menuju ke Sesi Paralel</p>
Sesi Paralel		
10.30 – 12.30	120 menit	<p>Sesi Paralel 1: Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Penghidupan yang Berkelanjutan</p> <p>Pemantik Diskusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Yayasan Pikul 3. Bank NTT <p>Fasilitator: M. Sulton Mawardi, M.Com. (Peneliti Senior SMERU)</p>

Waktu (WITA)	Durasi	Agenda acara
		<p>Sesi Paralel 2: Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan</p> <p>Pemantik Diskusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2. USAID ERAT 3. Universitas Nusa Cendana <p>Fasilitator: Uumbu Reku Raya, ME. MA. PhD (Peneliti Independen)</p>
		<p>Sesi Paralel 3: Pengembangan Pariwisata untuk Mendukung Pengembangan Penghidupan dan Pelestarian Lingkungan</p> <p>Pemantik Diskusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 2. AFD 3. Kamar Dagang dan Industri NTT <p>Fasilitator: Muhammad Syukri, Ph.D. (Peneliti Senior SMERU)</p>
12.30 – 13.30	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Istirahat & Penampilan Grup Vokal
Sesi Panel		
13.30 – 15.00	90 menit	<p>Diskusi Rekomendasi Kebijakan Daerah dan Upaya Kolaboratif Mencapai Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator: Aisyah Putri Mayangsari, MPH.Adv. (Peneliti SMERU) 2. Co-Fasilitator: Veto Tyas Indiro, S.E. (Peneliti SMERU)
Sesi Penutupan		
15.00 – 15.15	15 menit	<p>Rangkuman Hasil Diskusi</p> <p>Heni Kurniasih, Ph.D. (Sekretaris Lembaga The SMERU Research Institute)</p>
15.15 – 15.30	15 menit	<p>Sambutan Penutupan</p> <p>Dr. Alfonsus Theodorus (Kepala Bappelitbangda NTT)</p>

Penanggung Jawab dan Narahubung

Narahubung untuk kegiatan ini adalah:

Nama	No. HP	E-mail
Heni Kurniasih (Penanggung Jawab)	0812 8887 4145	henik@smeru.or.id
Muhammad Harits Kamaaluddin	0877 2049 2605	mkamaaluddin@smeru.or.id